

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alijoyo, Antonius, 2021, *Structured or Semi-structured Interview*, CRMS Indonesia, Bandung.
- Asshidiqqie, Jimmly, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asshidiqqie, Jimmly, 1998, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind. Hill Co., Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2017, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hooft, Ph. Visser't , 2001, *Penemuan Hukum*, Laboratorium Hukum FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
- HS, Salim dan Nurbaini, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R., 2012, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM – PTHM, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Munadi, 2017, *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*, UNIMAL Press, Lhokseumawe.
- Salam, Moch. Faisal, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Publishing, Jakarta.

Solikin, Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan.

Tambunan, A.S.S., 2013, *Hukum Militer Indonesia, Suatu Pengantar*, Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”, Jakarta.

Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Burgerlijk Wetboek)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 Tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

## **C. Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal**

A., Felia Primanda, 2023, “Penjatuhan Pidana Pemecatan dari Dinas Militer terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Perkara Tindak Pidana Desersi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Afif Khalid, 2014, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia”, *Al’ Adl*, Volume VI nomor 11.

Chalim Munsharif Abdul dan Farhan, Faisal, Januari – April 2015 “Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Tinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, No.1

Larasati, Cindy Fajar, 2018, “Penerapan Hukum Disiplin Militer Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana” *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Nanda, Dwika Wahyu, 2023, “Putusan Pengadilan Militer II-10 Yogyakarta Dalam Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Di Muka Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Nugraha, Muhamad Tisna, “Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusia”, *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*.

Pawana, Juang dan Pambudi, Kukuh Setyo dan Muhaemin, “Mengembalikan Kemanunggalan TNI dan Rakyat: Analisis Kritis Terhadap Tradisi Pembinaan Calon Perwira TNI, *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*.

Sugiarto, Totok, Maret 2021 “Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi”, *Jurnal IUS*, Vol.IX, No.01.

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020

Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020

Putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/Mil/2023

## **E. Internet**

Amnesty International, 2021, “Serba Serbi Hak LGBTQIA+”  
<https://www.amnesty.id/serba-serbi-hak-lgbtqia/>

Consulate General Of The Republic Of Indonesia In Vancouver, Canada, 2016 “Indonesia At A Glance”,  
[https://kemlu.go.id/vancouver/en/pages/indonesia\\_at\\_a\\_glance/2016/etc-menu](https://kemlu.go.id/vancouver/en/pages/indonesia_at_a_glance/2016/etc-menu)

Erin Blakemore, 2021 “From LGBT to LGBTQIA+: The evolving recognition of identity”,  
<https://www.nationalgeographic.com/history/article/from-lgbt-to-lgbtqia-the-evolving-recognition-of-identity>

Hukumonline, 2022 “6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>

Jeffry J. Iovannone, Medium, 2018 “A Brief History of the LGBTQ Initialism” <https://medium.com/queer-history-for-the-people/a-brief-history-of-the-lgbtq-initialism-e89db1cf06e3>

PUSPEN TNI, 2023 “Sejarah TNI”, <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>

Worldometer, 2023 “Indonesia Population”,  
[www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/](http://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/)